

MENCARI PEMIMPIN REPUBLIK

Alois A. Nugroho

Ditilik dari kebiasaan (*ethos*) yang hidup dalam masyarakat yang relatif sudah lebih demokratis, diskusi publik dengan topik “Mencari Pemimpin Republik” dalam konteks menyambut datangnya masa kampanye Pilpres adalah hal yang wajar belaka. Kata orang berbahasa Inggris, “*it goes without saying*”. Debat-debat calon Presiden menjelang pilpres Amerika akhir tahun lalu diikuti dengan penilaian-penilaian khalayak, baik di media cetak, media elektronik (termasuk internet), pertemuan-pertemuan tatap muka, mulai dari yang akademis sampai yang berupa obrolan-obrolan di kedai kopi.

Namun usia revitalisasi dan reorientasi demokrasi kita belumlah terlalu tua, untuk tidak mengatakan (mengutip ungkapan mantan Presiden Abdurrahman Wahid) masih dalam taraf “taman kanak-kanak”. Setidak-tidaknya sejak 1959 sampai dengan 1998, demokrasi kita sebenarnya “demokrasi terpimpin”, dengan bobot lebih besar pada “pemimpin” dan konsep demokrasi hanya dijadikan *political gimmick*.

Oleh karena itu, 10 tahun sesudah reformasi ini setiap upaya untuk melakukan refleksi bersama, untuk melakukan *collective deliberation* secara bebas dan setara, sangatlah membesarkan hati. Upaya semacam ini sekurang-kurangnya menjaga agar demokratisasi kita tidak mengalami regresi ke “demokrasi terpimpin”. Lebih jauh, upaya semacam ini diharapkan memberi kontribusi pada terciptanya suatu *habitus* baru, yakni demokrasi sebagai *ethos* politik.

Demokrasi *Simulacra*

Dalam artikelnya yang berjudul “Republik Tanpa Alternatif” (*Kompas*, 16 Mei 2009), M. Fadjoel Rachman mencemaskan perkembangan yang terjadi dalam parpol-parpol kita yang semakin “feodalistis, oligarkis, ultrapragmatis, semiotoriter”. Parpol-parpol – yang notabene merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengajukan calon Presiden – dalam kenyataannya mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari “gravitasi budaya” (paternalisme, feodalisme) dan “gravitasi pasar” (ultrapragmatisme, politik uang, oligopoli). Ketakmampuan ini membuat demokrasi kita dibayang-bayangi regresi lagi ke arah “demokrasi terpimpin”.

Bayang-bayang regresi itu juga didukung oleh politik pencitraan. “*Teledemocracy*” menjadi penting, iklan kampanye politik menjadi lebih penting dari pada pemaparan visi dan misi.¹⁾ Juga terkesan lebih penting, acara deklarasi yang lebih memahat “*image*” daripada mendiskusikan agenda secara publik. Diilhami oleh Hannah Arendt dan Jean-Baudrillard, Haryatmoko dalam tulisannya yang berjudul “Delegitimasi Politik Citra” (*Kompas*, 20 Mei 2009), mengatakan bahwa politik Indonesia sekarang bukanlah perjuangan yang mendasarkan diri pada “representasi”, melainkan hingar bingar yang mendasarkan diri pada “simulasi”.

Representasi mengandaikan sikap tanpa pamrih, karena politik diukur dari keutamaan (*virtues*) sang politisi dan upayanya untuk mengabadikan diri melalui jasa-jasa kepada masyarakat dan melalui kebijakan dan perilaku politik yang ditandai oleh *fairness*. Singkatnya, dalam representasi itu citra mengacu pada kebajikan dan kebijakan politis sang politisi. Citra sebagai *signifier* menampilkan kembali realitas *signified* yang berupa kebajikan politik dan kebijakan politik sang politisi. Citra itulah yang tetap dikenang, tetap hidup biarpun sang politisi sudah lama meninggal.²⁾

Sebaliknya, dalam simulasi, citra politisi yang ditampilkan memang sejak semula dimaksud untuk tidak menampilkan realitas (kebajikan dan kebijakan politik). Dalam terminologi Baudrillard., citra itulah *simulacrum*, yang kurang lebih berarti *signifier* tanpa *signified*. Simulacrum telah menggeser realitas sebagai patokan kebenaran. Dalam bahasa bursa efek, polling seorang capres lebih ditentukan oleh “sentimen pasar”, dan bukan oleh “kondisi fundamental”, katakanlah “fundamental politis”. Lebih tepat lagi, hasil polling itu sendiri sudah merupakan apa yang dapat disebut “*simulacrum*”.

Dalam bahasa Rocky Gerung, politik lalu tidak lagi berurusan dengan kepentingan publik, melainkan berubah menjadi narasi media massa yang menghibur, suatu tontonan, persis seperti *infotainment*. Neologisme untuk itu ialah “*politainment*” (*Kompas*, 24 Mei 2009). “Karena itu, siapa pun yang nanti memenangi pilpres Juli nanti, sesungguhnya dia memenangi sebuah politik yang tanpa substansi, yaitu menang karena ditonton bukan menang karena dipahami”.

Kalau demikian, tidak mengherankan bahwa seorang Seto Mulyadi, yang dikenal sebagai pemerhati pendidikan anak-anak, menurunkan esainya yang berjudul “Mari Belajar Berbohong” (*Kompas*, 19 Mei 2009). Dalam artikel itu, kak Seto menulis, bahwa seharusnya pemilih pemula yang berjumlah sekitar 51 juta itu mendapatkan pemahaman bahwa pemilu adalah bagian pendidikan politik, bukan sekadar ritual demokrasi untuk mengganti pimpinan dan wakil rakyat, tetapi terutama “menjadi pintu gerbang awal dan utama untuk menuju keadaan yang lebih baik bagi bangsa”. Namun pada kenyataannya, “generasi anak negeri ini

terpaksa menjumpai kenyataan, pemilu yang memakan biaya besar ini justru merupakan pendidikan politik yang diwarnai kecurangan dan kebohongan”.

Platform, karakter dan agenda politik

Dengan memerhatikan dua tipe pencitraan, yakni representasi dan simulasi, pencitraan tipe representasi atas pasangan capres-cawapres memang wajib disosialisasikan dalam pelbagai bentuk dan media. Pencitraan tipe simulasi wajib untuk dihindari, kecuali kalau memang yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk dianggap mengajak “mari belajar berbohong”.

Meskipun demikian, penilaian publik atau deliberasi kolektif atas pasangan capres-cawapres ini tidaklah memadai kalau hanya didasarkan pada pencitraan semata-mata. Kalau mengikuti Hannah Arendt, pencitraan yang tulus pun hanya memberi gambaran karakter pribadi seorang calon padahal, bagi Arendt, pembedaan “ranah publik” (*polis*) dan “ranah privat” (*oikos*) sangatlah penting dalam demokrasi.³⁾ Bruce E. Gronbeck menyebutkan bahwa selain karakter pribadi seorang calon pemimpin republik, yang perlu dinilai oleh publik adalah juga motifnya dan kompetensinya.⁴⁾

Dalam opini yang berjudul “Debat Capres-Cawapres” (*Kompas*, 19 Mei 2009), Hikmahanto Juwana menulis, bahwa pemilih tidak seharusnya memilih hanya berdasarkan “iklan, pesona calon, bahkan sekadar siapa yang memakai peci atau wanita”. Deliberasi dari *informed electorate* wajib mendapat masukan komprehensif berupa setidaknya dua hal lain, yakni yang terkait dengan aliran atau *platform* politik yang dianut capres dan cawapres serta kebijakan yang akan dijalankan. Konsep “platform” ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang secara padat disebut Gronbeck sebagai “motif”. Begitu pula yang dimaksud Gronbeck dengan “kompetensi” juga lebih berhubungan dengan kebijakan yang akan dijalankan.

Jadi, selain karakter ada dua hal penting lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu platform, motif atau misi dan , yang kedua, agenda atau program. Dalam artikelnya yang berjudul “Mereka Mewakili Apa dan Menjawab Apa” (*Kompas*, 20 Mei 2009), Daniel Sparingga menulis, bahwa karakter atau “pilihan berbasis figur” hanya menuntun kita pada perkara yang “berkaitan dengan ikhwal personal, semisal karakter, kepribadian, tabiat, iman, ketakwaan dan integritas moral”. Dengan mengakui bahwa semua hal itu penting dalam kehidupan pribadi dan antar pribadi dalam komunitas-komunitas terbatas, Sparingga menegaskan bahwa “dalam politik yang terutama bersifat publik, ruang bagi yang personal, walaupun ada, bukanlah pendekatan terpenting...Pertanyaan pokoknya haruslah berkaitan dengan dua hal yang sangat fundamental, yaitu para calon itu mewakili gagasan-gagasan apa dan menjawab tantangan-tantangan apa”. Pertanyaan pokok pertama

berhubungan dengan ideologi, platform, atau visi. Pertanyaan kedua, dengan agenda, program dan rencana kebijakan yang akan dijalankan lima tahun ke depan.

Menimbang platform dan program

Untuk dapat menimbang sejauh mana isu tentang platform atau, dalam bahasa John Rawls, “*comprehensive doctrine*”⁵⁾ memang perlu dibuat penelitian *content analysis* yang serius terhadap opini-opini di koran dalam lingkup waktu tertentu. Seluruh diskusi tentang “neoliberalisme” sebagai reaksi atas pemilihan figur Boediono sebagai calon wakil presiden sebenarnya menyangkut *comprehensive doctrine*, sejauh dijelaskan apa itu “neo-lib” dan apa implikasi praktis “neo-lib”, jadi bukan sekadar sebagai label yang ditempelkan sebagai citra (buruk) seorang figur. Begitu pula isu tentang “ekonomi kerakyatan” sebenarnya punya potensi untuk menjadi argumentasi dan deliberasi tentang “platform” itu, namun sayang “ekonomi kerakyatan” dalam banyak kesempatan komunikasi politik hanya menjadi label untuk mendapat citra (baik) bagi diri sendiri. Dalam komunikasi politik kita, isu neo-lib vs. ekonomi kerakyatan kurang berkembang menjadi argumentasi antar platform dan, sebaliknya, lebih merupakan “perang citra”.

Sebenarnya, untuk kepentingan argumentasi antar platform, tulisan H.S Dillon yang berjudul “Memaknai Pilihan Wakil Presiden” (*Kompas*, 16 Mei 2009) layak dikembangkan dan diperdalam. Dillon melihat adanya krisis tripetaka, berupa dampak drastis krisis finansial-ekonomis, melangitnya harga energi dan pangan, serta perubahan iklim yang mengancam peradaban. Ketiga petaka itu berpangkal pada defisit tata pamong (*governance*) pada semua tataran. Tata pamong telah dihegemoni oleh pasar bebas dan “pasar bebas tanpa kendali menafikan nilai-nilai kemanusiaan”.

Keinginan untuk memperoleh pendalaman dan pengembangan soal “neo-lib” ini serasa terjawab ketika membaca artikel A. Tony Prasetiantono, “Neoliberalisme” (*Kompas*, 27 Mei 2009). Terjawab sudah misteri yang terkandung di balik ungkapan “Washington Consensus”, yang tiada lain adalah titik temu dari diskusi para ekonom IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang membahas jalan keluar dari krisis ekonomi Amerika Latin pertengahan tahun 1980-an dan 1994. Titik temu itu dijadikan formula untuk menangani krisis yang terjadi di negara-negara berkembang dengan kondisi yang kurang lebih sama dengan Amerika Latin. Dalam situasi krisis, Negara-negara Amerika Latin direkomendasikan menjalankan 10 kebijakan yang dapat diperas menjadi tiga pilar terpenting, yakni “(1) kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif; (2) privatisasi BUMN dan (3) liberalisasi pasar atau *market fundamentalism*”.

Sebagai kesimpulan, Toni Prasetiantono merumuskan, “Neoliberalisme adalah formula generik yang mengandung hal-hal yang baik, misalnya disiplin fiskal dan

prioritas bagi belanja pemerintah. Namun, sebagaimana obat, jika diberikan dalam dosis tinggi dan *timing* tidak tepat, hasilnya bisa kontraproduktif. Pengalaman pahit Indonesia semasa krisis 1998 telah mengajarkan banyak hal tentang hal ini”

Dengan latar belakang kritik Habermas terhadap Rawls dalam “*post-secular age*”,⁶⁾ artikel H.S Dillon itu juga menarik ketika menyatakan:” Seorang warga Negara Indonesia mempunyai sosok ganda, masing-masing diperankan sesuai dengan sifat hubungannya...Dalam hubungannya dengan masyarakat luas [publik] dia sosok seorang warga Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD’45. Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia beragama dan nasionalis sekaligus”. Dalam konteks pemikiran Rawls, Habermas dan juga Paul Ricoeur tentang demokrasi, persoalannya kemudian adalah bagaimana seorang pemimpin sebuah republik demokratis menggunakan atau tidak menggunakan “bahasa agama tertentu” (atau suku tertentu, atau aliran tertentu dalam ilmu pengetahuan, atau ideologi tertentu) ke dalam “bahasa publik” atau – dalam istilah Dillon – “dalam hubungannya dengan masyarakat luas”.⁷⁾

Ketika dalam “Republik Tanpa Alternatif” (*Kompas*, 16 Mei 2009), Fadjoel Rachman menganggap bahwa dalam kasus Ahmadiyah dan UU Pornografi para elite republik telah mengelak dari “kewajiban demokratis”, yang terjadi sebenarnya ialah sebuah penilaian atas platform para elite republik itu. Dalam penilaian Fadjoel Rachman, platform ketiga pasangan capres-cawapres ini dapat dipertanyakan dilihat dari sudut pengembangan ethos demokrasi. Mereka boleh dikatakan merupakan tiga pasangan anakronis, penerus “Soeharto-Orba” dan “Pembangunanisme” yang masih ingin terus bertahan “di tengah dunia yang dipimpin kaum muda cerdas, kosmopolit, dengan *Zeitgeist* demokrasi dan HAM”.

Dalam “Debat Capres-Cawapres” (*Kompas*, 19 Mei 2009), Hikmahanto Juwana juga memberikan contoh bagaimana platform itu dinilai bersama dengan karakter dan program. Platform itu dinilai dari jawaban kandidat atas pertanyaan semisal, setuju atau tidak kandidat itu membuka tempat perjudian yang dilokalisasi. Bagaimana kandidat menjawab pertanyaan ini akan menyingkapkan apa “platform” yang menjadi landasan kebijakannya.

Selanjutnya dalam esei yang sama (*Kompas*, 16 Mei 2009), Fadjoel Rachman – dengan mempertimbangkan rekam jejak mereka - meragukan bahwa agenda publik para kandidat akan mendorong lajunya proses regenerasi kepemimpinan nasional, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta mengurangi ketergantungan utang yang masif. Program yang baik adalah yang meneruskan cita-cita para pendiri Republik, yang dirumuskan dalam kata-kata Richard Quinney, yakni mendirikan “*a state which provides all individuals a fair distribution of the resources necessary to maintain a good standard of living*”

Dalam esainya yang berjudul “Menimbang Preferensi Rakyat” (*Kompas*, 20 Mei 2009), Ali Khomsan mengomentari “perang citra” dalam soal “cepat vs lambat” dan “gegabah vs hati-hati” dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Perang citra itu telah mengalihkan perhatian publik pada pelaksanaan program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti bidang gizi kesehatan, tingkat kematian bayi dan ibu hamil, indeks pembangunan manusia pada umumnya yang mengalami stagnasi. “Bercermin pada pelaksanaan program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu, sebenarnya yang kita inginkan adalah pemimpin yang matang dalam perencanaan, teliti dalam pelaksanaan, dan hasil programnya segera dapat dinikmati masyarakat”.

Hikmahanto Juwana (*Kompas*, 19 Mei 2009) mengurai kemasan citra tentang “ekonomi kerakyatan” itu menjadi beberapa pertanyaan menyangkut program. Apakah peran negara akan dominan sehingga berbagai badan usaha milik negara akan dikuasai kembali oleh negara ataukah – sebaliknya - negara cukup berperan untuk mengatur pasar tanpa melakukan intervensi? Bagaimana upaya kandidat untuk membuka lapangan kerja, apakah kandidat mampu mengidentifikasi kendala-kendalanya, bagaimana kandidat akan mengatasi kendala-kendala itu? Dan banyak pertanyaan lain menyangkut program kerja dapat diajukan, semisal kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, utang luar negeri, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), dan pengelolaan sumber daya alam.

Kondisi Publik

Kontestasi antara kandidat presiden memang tidak cukup hanya berupa kontestasi citra, tetapi yang lebih penting lagi adalah kontestasi visi dan program. Namun kualitas presiden terpilih pun akhirnya tergantung pula pada satu faktor lain, yakni faktor publik pemilih. Dalam “Reagan, Rhetoric and the Public Philosophy”,⁸⁾ Chrystopher Lyle Johnstone mengatakan bahwa dalam upaya mencari pemimpin republik salah satu faktor ialah kompetensi atau kecerdasan publik untuk mengambil keputusan. Kompetensi publik ini dapat diringkas menjadi dua, yakni – pertama - apa yang disebutnya *public philosophy* serta – kedua - kemampuan retorika publik.

Dalam masyarakat demokratis, “filsafat publik” atau sebutlah etos sosial publik berintikan “hati nurani sosial”, yakni kepedulian (*solicitude*, kata Ricoeur) kepada kepentingan dan kesejahteraan warga sebangsa dan setanah air serta komitmen untuk berpartisipasi mengupayakan kebaikan bersama (*common good*) termasuk kepentingan pribadi. Bahwa sikap peduli terhadap semua warga sebangsa dan setanah air ini memuat imparisialitas, keadilan, *just distance* katakanlah, adalah konsekuensi rasional dari norma deontologis berupa *solicitude*.

Kemampuan retorika ditunjukkan dengan kemampuan untuk berargumentasi, termasuk argumentasi dengan diri sendiri untuk menghindari “banalitas” dalam pengambilan keputusan. Ini pun mengandaikan kemampuan untuk dapat menghindari argumen-argumen yang absah (*valid*) dan yang tidak, antara penalaran yang sungguh-sungguh masuk akal dan yang tampaknya saja bagus, antara bukti yang meyakinkan dan yang lemah.

Tanpa kemampuan ini, publik sebenarnya kurang *qualified* untuk mengambil keputusan politik. Publik harus memiliki solidaritas dan kepedulian yang luas, harus memiliki pengetahuan yang luas, harus memiliki kemampuan berargumentasi yang cukup memadai. Kalau publik belum sepenuhnya memiliki kemampuan ini, maka Johnstone menganggap para politisi dalam negara demokratis wajib meningkatkan kompetensi publik itu dan - dapat kita tambahkan - tidak justru “memperbodoh” dengan memperkedil kontestasi kandidat menjadi sekadar “perang citra”.

Penutup

Karena sudah mengutip tulisan yang membahas duduk perkara “Neo-lib” dan sudah menyinggung paham “hati nurani sosial”, sebenarnya agar adil saya ingin menutup makalah ini dengan kutipan dari “Indonesia Raya”: “Di sanalah aku berdiri, *jadi pandu ibuku*”. Ini adalah janji kaum muda terdidik yang dibebani oleh sejarah dengan misi historis untuk memerdekakan bangsa dan membebaskan anak-anak bangsa. Bukan hanya politisi yang berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi publik. Kita semua dipanggil untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. *Jadi pandu Ibuku*.

Makalah ini sebenarnya ingin diakhiri sampai di sini saja. Tetapi tulisan Emha Ainun Nadjib berjudul “Bukan Sembarang Presiden” (*Kompas*, 22 Mei 2009) tetap terlampaui menggelitik untuk dibiarkan tidak dikutip, justru karena ke-lain-annya (*otherness*). Emha menganggap setiap presiden yang terpilih dalam era pasca-reformasi bukanlah “sembarang presiden”, karena sudah dipilih oleh publik yang matang dan berpengalaman.

“Bangsa Indonesia sudah memiliki pengalaman peradaban selama berpuluh-puluh abad untuk memilih pemimpinnya. Pemilihan presiden di abad ke-21 ini jauh lebih sederhana karena sekadar melibatkan penduduk atau warganegara. Adapun pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah membawa mereka memilih pemimpin tertingginya dengan melibatkan Nyi Roro Kidul, Walisongo, ruh-ruh leluhur, pasukan lebah, lembu atau kerbau, bahkan...jin”

“Sistem budaya dan mekanisme sosial bangsa Indonesia yang sudah matang sejak puluhan abad yang lalu memastikan bahwa pemimpin-pemimpin nasional mereka

yang lahir dari demokrasi Indonesia adalah putra-putri terbaik bangsanya. Harus mereka yang memimpin. Tak terbantahkan. Bisa jadi, Tuhan sendiri pun tak mungkin mengganti mereka karena ia mengikatkan diri pada kegembiraan dan kebanggaan menyaksikan tingkat kematangan budaya demokrasi bangsa dan negara Indonesia..”

Beruntung bahwa – apa pun *agenda setting* redaksi *Kompas* – tulisan dengan seluruh *otherness* ini ternyata disajikan ke hadapan publik. Tulisan Emha menjadi semacam – meminjam Richard Rorty – *rhetoric of mockery* yang menunjukkan aspek *rhetoric of conviction* dalam diskursus yang dikutip di sini. Kita harus melakukan refleksi lagi, membongkar asumsi-asumsi lagi. Mungkin kita akan berlabuh di dermaga yang sama, sesudah mengarungi beberapa bandar yang belum kita kenal. Mungkin juga kita akan membuang jangkar di sebuah pulau yang belum berpenghuni. Itu artinya, meski pun tulisan ini berakhir, namun pengajian tidak berakhir (*sit finis libri, non finis quaerendi*)

Catatan Akhir

- 1) “Teledemocracy” ialah penguatan demokrasi melalui televisi yang disertai asumsi dan harapan bahwa televisi akan mengembangkan dan memperkuat budaya demokrasi dalam kehidupan politik. Bahwa asumsi dan harapan seperti itu tidak memiliki dasar empiris yang cukup kuat, lihat, misalnya Scott London, “Teledemocracy vs. Deliberative Democracy”, *Journal of Interpersonal Computing and Technology*, no. 2 (April), vol. 3 (1995). Lihat juga, Robert E. Denton, Jr., “Dangers of Teledemocracy: How the Medium of Television Undermines American Democracy”, *Political Communication Ethics: An Oxymoron?*, London: Praeger, 2000. Lihat juga Alois A. Nugroho, “Tinjauan Etis Atas Iklan Kampanye Politik sebagai Bagian dari *Teledemocracy*”, *Respons. Jurnal Etika Sosial*, vol 12 (2007) no. 2 (Desember).
- 2) Bandingkan dengan uraian bahwa kebajikan “proaktif” perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. dalam Stephen Covey *The Seven Habits of Highly Effective People*. Sikap proaktif ialah sikap yang mengantisipasi “akhir hidup”, sebuah “*anticipatory resoluteness*” dari *Dasein* sebagai *Sein-zum-Tode* menurut Heidegger. Dalam bahasa sederhana, sikap proaktif ialah sikap yang berusaha melaksanakan jawaban atas pertanyaan “kalau aku mati nanti, aku mau dikenang sebagai apa atau sebagai orang yang bagaimana?”
- 3) Ronald C. Arnett, “Dialectical Communicative Labor”, Pat Arneson, *Perspectives on Philosophy of Communication*, West Lafayette: Purdue University Press, 2007, pp. 67-82.

- 4) Bruce E. Gronbeck, "The Ethical Performance of Candidates in American Presidential Campaign", Robert E. Denton, Jr, *Political Communication Ethics: An Oxymoron?*, London: Praeger, 2000.
- 5) John Rawls, "The Idea of Public Reason Revisited", *University of Chicago Law Review*, vol. 64 no. 3 (Summer, 1997). Menurut Rawls, kosa kata agama dan *comprehensive doctrine* lain boleh saja dipergunakan dalam diskursus publik non-politik atau pada diskursus politik non-publik misalnya yang dilakukan di komunitas-komunitas latar. Namun bila diskusi publik politik formal sudah mulai, kosa kata agama (dan *comprehensive doctrine* apa pun) wajib dihindari, karena penggunaannya akan mempersulit warga Negara lain yang berasal dari *comprehensive doctrine* yang menggunakan nalar dan kosa kata lain.
- 6) Juergen Habermas, "Religion in the Public Sphere", lecture presented at the Holberg Prize Seminar, November 29, 2005. Meski pada intinya setuju dengan keadilan prosedural dalam konsep demokrasi John Rawls, Habermas mengajukan dua catatan. Pertama, yang berasal dari deontologi Kant sendiri, yaitu *ought implies can*; dalam konteks diskusi ini, semboyan itu berarti bahwa kewajiban demokratis Rawls hanya berlaku apabila kaum beragama memang mampu meninggalkan kosa kata agama mereka dan adanya kemampuan ini diragukan oleh Habermas. Kedua, kalau kewajiban itu tetap diberlakukan, ada kemungkinan kaum beragama akan mengalami keterpecahan diri secara psikologis; ini artinya melanggar hak-hak asasi kaum beragama.
- 7) Alois A. Nugroho, "Diskursus Agama dalam Komunikasi Politik: Meninjau-ulang Proposal John Rawls", makalah dibawakan dalam Konferensi HIDESE (Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia) ke 19, Semarang, 30-31 Januari 2009. Sesudah melihat unsur keadilan dalam "kewajiban demokratis" Rawls serta menimbang dua keberatan dari Habermas, maka artikel ini mengacu bukan pada "kewajiban untuk meninggalkan kosa kata agama" dalam diskursus publik politik formal, melainkan pada "kewajiban untuk menerjemahkan kosa kata agama itu ke dalam kosa kata publik". Ini diilhami oleh Paul Ricoeur, *Reflections on the Just*, 2007.
- 8) Christopher Lyle Johnstone, "Reagan, Rhetoric, and the Public Philosophy: Ethics and Politics in the 1984 Campaign", *The Southern Communication Journal*, Winter 1995, vol. 60, iss. 2, pp 93-109.

Tulisan ini disampaikan pada Pengajian Komunitas TITIK-TEMU Nurcholish Madjid Society dengan tema "Mencari Pemimpin Republik" pada Kamis, 28 Mei 2009.